


Studi Pengembangan Kawasan Halal Tourism di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Andi Idham A.P¹, St. Hafsa Umar^{2*}, Suci Wening Asih³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

E-mail: hafsah.umar@uin-alauddin.ac.id

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5749>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 05 Feb 2026

Revised: 20 Feb 2026

Accepted: 03 Mar 2026

Kata Kunci:

Wisata Halal,
Pengembangan
Kawasan, UMKM
Syariah, Pemberdayaan
Masyarakat, Bontotiro.

Keywords:

Halal Tourism, Regional
Development, Sharia
MSMEs, Community
Empowerment,
Bontotiro.



ABSTRACT

Pengembangan wisata halal menjadi peluang strategis bagi daerah berciri sosial keagamaan kuat, termasuk Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba. Pengabdian ini bertujuan mengidentifikasi potensi kawasan, merumuskan strategi pengembangan, dan memperkuat peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat berbasis syariah. Metode meliputi survei lapangan dan analisis data sekunder mengacu pada pedoman wisata halal 2019 melalui 11 indikator, serta pendekatan partisipatif berupa sosialisasi, pendampingan UMKM syariah, dan pelatihan pencatatan keuangan serta akses pembiayaan halal bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Hasil menunjukkan Bontotiro memiliki potensi wisata alam, religi, dan budaya yang didukung citra religius dan partisipasi masyarakat. Namun, aspek kebijakan, fasilitas ibadah, sertifikasi halal, promosi digital, dan permodalan UMKM perlu ditingkatkan. Penguatan UMKM syariah melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan pembentukan BMT menjadi strategi penting untuk mendukung ekosistem wisata halal berkelanjutan. Sinergi pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi membuka peluang Bontotiro menjadi destinasi halal yang kompetitif, inklusif, dan memberdayakan ekonomi lokal.

Halal tourism development presents a strategic opportunity for areas with strong socio-religious characteristics, including Bontotiro District, Bulukumba Regency. This community service program aims to identify regional potential, formulate development strategies, and strengthen the role of universities in sharia-based community empowerment. Methods include field surveys and secondary data analysis based on the 2019 halal tourism guidelines using 11 indicators, as well as a participatory approach, including outreach, mentoring of sharia-compliant MSMEs, and training in financial recording and access to halal financing in collaboration with sharia-compliant financial institutions. The results indicate that Bontotiro has potential for natural, religious, and cultural tourism, supported by a religious image and community participation. However, aspects of policy, worship facilities, halal certification, digital promotion, and MSME capitalization need to be improved. Strengthening sharia-compliant MSMEs through collaboration with sharia-compliant financial institutions and the establishment of BMTs (BMTs) is a crucial strategy to support a sustainable halal tourism ecosystem. Synergy between the government, community, and universities opens up opportunities for Bontotiro to become a competitive, inclusive, and local economic-empowering halal destination.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Andi Idham A.P, et al (2026). Studi Pengembangan Kawasan Halal Tourism di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, 4(4) 21839-21846. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5749>

PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata tidak terlepas dari kegiatan wisatawan yang berkunjung ke sebuah destinasi. Semakin banyaknya manusia yang menjadikan pariwisata sebagai bagian dari kebutuhan hidup dan semakin berkembangnya teknologi, maka hal itu akan berdampak pada peningkatan

kunjungan wisatawan pada suatu kawasan atau daerah tertentu yang memiliki daya tarik. (Setiawati et al., 2023) Di Indonesia industri pariwisata diberikan perhatian khusus terutama dari pihak pemerintah, yang secara berkelanjutan terus melakukan perbaikan di berbagai sektor pariwisata. Pembangunan pariwisata diperlukan agar dapat mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memberi manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.(Saptorini et al., 2018)

Indonesia saat ini diketahui sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, dengan 86,88% penduduk Indonesia beragama Islam (Kemendagri 2021). Maka dari itu sudah sepatutnya dari segi sektor pariwisata melihat sebuah peluang yang cukup potensial untuk berkembangnya sektor pariwisata yang berlandaskan nilai-nilai Islam atau yang biasa dikenal dengan istilah Halal Tourism. Selama ini halal tourism atau pariwisata halal dipandang sebagai wisata yang daya tarik dan tujuan wisatanya yaitu berkunjung ke makam (ziarah) ataupun ke masjid. Wisata halal tidak seperti itu, sedianya wisata halal merupakan wisata yang mempunyai berbagai macam daya tarik wisata baik alam, buatan, budaya dan sejarah yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.(Zainiddinov et al., 2018)

Perkembangan wisata halal dunia memicu semangat Indonesia untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada. Indonesia sudah memiliki modal dasar yang lebih baik dibandingkan negara lain dengan populasi muslim terbesar di dunia sehingga sangat antusias dalam menyambut wisatawan muslim. (Battour et al., 2019)

Berdasarkan hasil penelitian Global Muslim Travel Index (GMTI) dengan komprehensif yang dilakukan pada pasar perjalanan, wisata, dan perhotelan halal yang menganalisis 130 tujuan di seluruh dunia untuk membuat indeks di pasar perjalanan Muslim.

Tabel 1. ranking Global Muslim Travel Indeks Tahun 2021

Rank	Destinasi	Score
1	2	3
1	Malaysia	80
2	Turki	77
3	Arab Saudi	76
4	Indonesia	73
5	United Arab Emirates	72
6	Qatar	69
7	Singapura	69
8	Bahrain	68
9	Iran	68
10	Oman	68

Indonesia berada di urutan keempat tujuan wisata halal dunia, di bawah Malaysia, Turki dan Arab Saudi. Indonesia harus berusaha lebih keras dengan5 potensi yang dimiliki jika ingin melangkahi Malaysia, Turki dan Arab Saudi dalam mengembangkan wisata halal. Sebagai konsep baru didalam industri pariwisata di Indonesia, tentunya wisata halal memerlukan pengembangan lebih lanjut serta pemahaman yang lebih komprehensif terkait kolaborasi nilai-nilai keislaman yang disematkan didalam kegiatan pariwisata.

Sulawesi Selatan mempunyai banyak objek wisata yang menarik untuk dikunjungi wisatawan, salah satu kabupaten tujuan wisata yaitu Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba terletak di selatan jazirah Provinsi Sulawesi Selatan. Bulukumba memiliki 4 (empat) jenis pesona wilayah seperti dataran tinggi, dataran rendah, daerah pantai dan laut lepas, selaiin itu kekayaan alam dan keunikan budayanya juga memiliki daya pikat tersendiri. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pariwisata terus berupaya memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki tertulis Dalam peraturan daerah Kabupaten Bulukumba no.2 tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2025 yang memaparkan pembagian dan perencanaan pariwisata berdasarkan karakteristik objek wisata.(Pemerintah Kabupaten Bulukumba, 2021) . Dengan banyaknya pilihan objek wisata yang ditawarkan dan pengembangan promosi, akan semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk mengunjungi Kabupaten Bulukumba namun akan menciptakan dampak baik dan buruk untuk pengembangannya yang berkesinambungan, salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten

Bulukumba yang memiliki berbagai macam pesona dan keunikannya tersendiri terletak di Kecamatan Bontotiro. (A & Musaddad, 2023)

Kecamatan Bontotiro terletak dibagian timur Kabupaten Bulukumba berjarak 185 KM dari kota Makassar dan 35 KM dari pusat Kabupaten Bulukumba. Kecamatan Bontotiro merupakan kecamatan tempat penyiaran Islam pertama kali

di Kabupaten Bulukumba oleh Datuk Ri Tiro (Bahtiar, 2012) Kecamatan Bontotiro memiliki situs sejarah perkembangan Islam yaitu dengan adanya peninggalan kerajaan Tiro berupa makam-makam kuno. Dianggap kawasan suci oleh masyarakat

setempat, Kecamatan Bontotiro harus di proteksi dari fenomena negatif wisatawan yang terjadi di Kabupaten Bulukumba (Pitaloka, 2019). Memiliki potensi wisata alam (pantai Samboang dan Goa), wisata warisan budaya (Tugu peninggalan Jepang) dan wisata religi (Makam Dato Ditiro dan Makam Karaeng Sapobatu) walaupun belum terkenal seperti objek wisata lain di Kabupaten Bulukumba, objek wisata di Kecamatan Bontotiro dapat menjadi kawasan tujuan wisata apabila dikelola dengan bijaksana, karena itu konsep wisata halal merupakan keputusan yang tepat untuk menjaga citra kawasan dan menjadi alternatif daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk wisatawan muslim.

Sejalan dengan permasalahan diatas maka dibutuhkan strategi dalam mewujudkan kawasan halal tourism di Kecamatan Bontotiro berdasarkan potensi kawasan yang dimiliki. Maka penulis tertarik untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul: “Studi Pengembangan Kawasan Halal Tourism di Kecamatan Bontotiro

Kabupaten Bulukumba.” Untuk melihat bagaimana potensi wisata yang ada di Kecamatan Bontotiro dapat dikembangkan dan bermanfaat bagi masyarakat terutama.

Pengabdian ini memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat bermanfaat terhadap wilayah sekitar yaitu, mengidentifikasi potensi pengembangan kawasan halal tourism di kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, mengetahui strategi pengembangan kawasan halal tourism di kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba dan mengetahui peran perguruan tinggi dalam pengembangan kawasan halal tourism di kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan informasi dan edukasi bagi masyarakat kecamatan Bontotiro dalam pengembangan kawasan halal tourism.

METODE

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 78,34 km². Kecamatan Bontotiro terdiri dari 13 kelurahan dan desa. Dalam kegiatan pengabdian ini dilakukan bekerjasama dengan masyarakat setempat dinas pariwisata Kabupaten Bulukumba, kepala kecamatan Bontotiro dan pengelola objek wisata.

Hasil survey langsung maupun dari data-data sekunder lalu dilakukan perbandingan dengan standar atau acuan yang dalam penelitian ini adalah pedoman penyelenggaraan wisata halal tahun 2019, untuk mengetahui seberapa besar potensi yang ada meliputi perwilayahan, daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata.

Tabel 2. Rincian penilaian kriteria pariwisata halal

Variabel	Dimensi	Indikator	Penilaian
1	2	3	4
I	perwilayahan	1 kebijakan	1
		2	2
		3	3
		4	4
II	Daya Tarik Wisata	1 Daya Tarik Wisata	1
		2	2
		3	3
		4	4

				5	kemusyirikan
					Berpakaian dan berpenampilan sopan bagi pramuwisata dan tenaga pelayanan
III	Fasilitas Umum	1	Mesjid/Musholla	6	Tempat ibadah yang memiliki kelengkapan
		2	Toilet Umum	7	Tersedia toilet yang memiliki kelengkapan
IV	Fasilitas Pariwisata	1	Jasa Kawasan Pariwisata	8	Tempat ibadah yang memiliki kelengkapan
				9	Tersedia pilihan jasa makanan dan minuman yang bersertifikat halal minimal berjumlah 3 buah.
				10	Tersedia toilet yang memiliki kelengkapan
				11	Tersedia pilihan penginapan Halal

Terdapat 11 indikator penilaian yang akan diukur apakah Kecamatan Bontotiro berpotensi atau tidak dalam pengembangan kawasan wisata halal, terpenuhi apabila 50% indikator yang menjadi tolak ukur tersedia. Sesuai dengan pedoman panduan penlenggaraan wisata halal (Sutono & Rahtomo,2020).

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara partisipatif dan edukatif melalui beberapa tahapan terintegrasi. Tahap awal dilakukan melalui kegiatan sosialisasi pengembangan wisata halal yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan lokal mengenai konsep, prinsip, serta standar wisata halal berbasis nilai-nilai syariah. Sosialisasi ini menekankan pentingnya penyediaan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, seperti ketersediaan produk halal, fasilitas ibadah, serta tata kelola usaha yang etis dan transparan. Selanjutnya, dilakukan penyuluhan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan wisata guna memperkuat kapasitas usaha mereka. Penyuluhan difokuskan pada strategi peningkatan kualitas produk, inovasi layanan, pengemasan, branding, serta optimalisasi potensi lokal agar mampu bersaing dan terintegrasi dalam ekosistem wisata halal secara berkelanjutan.

Tahap berikutnya berupa pelatihan teknis pencatatan keuangan UMKM berbasis prinsip keuangan syariah. Kegiatan ini bertujuan membekali pelaku usaha dengan kemampuan menyusun pencatatan transaksi secara sistematis, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah, termasuk pemisahan modal dan keuntungan, pencatatan akad, serta pengelolaan arus kas yang sehat. Selain itu, peserta diberikan pemahaman mengenai akses terhadap pembiayaan halal melalui lembaga keuangan syariah, mekanisme pengajuan pembiayaan, serta jenis akad yang relevan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dengan pendekatan ini, diharapkan UMKM tidak hanya mampu meningkatkan kapasitas manajerial dan finansialnya, tetapi juga memperoleh dukungan permodalan yang sesuai prinsip syariah, sehingga berkontribusi secara nyata dalam mendukung terbentuknya destinasi wisata halal yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari potensi wisata Kabupaten Bulukumba yang memiliki keunikan dan keunggulan lokal diantaranya adalah adanya kelompok masyarakat suku Bugis yang memiliki jenis keahlian membuat kapal phinisi, budaya Kajang yang mempunyai budaya yang unik yang mempertahankan jaman tradisional hingga saat ini dan sejarah perkembangan islam oleh dato tiro. Adanya 12 wisata bahari yang tersebar di beberapa Kecamatan di wilayah Kabupaten Bulukumba yaitu Pantai Tanjung Bira, Pantai Apparalang, Pantai Bara, Pantai Liukang Loe, Pantai Mandala Ria, Pantai Marumasa, Pulau Kambing, Pantai Samboang, Pantai Kasuso, Pantai Ujung tiro, Pantai Lemo-Lemo, Pantai Panrang Luhu menjadi

salah satu fenomena alam yang luar biasa dan dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata sehingga mampu menarik wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak.

Pariwisata di Kabupaten Bulukumba diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Bulukumba no.2 tahun 2021 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2021-2025 secara keseluruhan, belum ada peraturan daerah ataupun kebijakan lain mengenai pengembangan wisata halal di Kabupaten Bulukumba khususnya di Kecamatan Bontotiro namun,

pemerintah setempat sementara gencar-gencarnya merancang tentang pengembangan pariwisata halal di Kecamatan Bontotiro dengan pengajuan proposal mengenai pengembangan ekowisata syariah di Kecamatan Bontotiro kepada pemerintah berwenang dan pihak swasta.

Kekuatan daya tarik wisata di Kecamatan Bontotiro ini terbilang lengkap dengan tersedianya dari wisata alam, wisata bahari hingga wisata sejarah yang tersebar di Kecamatan Bontotiro dan telah tercatat dalam perda Kabupaten Bulukumba no.2 meliputi:

1. Makam penziar Agama Islam Dato Tiro
2. Sumber mata air limbua
3. Kolam renang limbua
4. Permandian sumur panjang
5. Pantai samboang
6. Bukit pattiroan tugu jepang

Potensi daya tarik wisata di Kecamatan Bontotiro ini berada dalam lokasi yang berdekatan antara satu dan lainnya, hal ini berpotensi untuk menjadikan objek wisata ini terintegrasi dan menjadi atraksi wisata yang tarik menarik. Dalam menerapkan sistem pariwisata halal dapat diukur dari indikator berikut:

1. Citra yang positif dan aman

Ditinjau dari sejarahnya Kecamatan Bontotiro merupakan tempat penziaran Islam pertama di Kabupaten Bulukumba maka telah menjadi tanggung jawab bagi masyarakat untuk selalu menjaga citra positif kecamatan Bontotiro juga di dukung dengan keramahan masyarakat setempat kepada wisatawan akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada wisatawan yang berkunjung, di lokasi daya tarik wisata juga telah dijaga orang-orang yang telah ditunjuk oleh pengelola wisata untuk menjaga keamanan sehingga terbebas dari pencurian dan tindak kriminal lainnya.

2. Penunjuk Arah

Petunjuk arah sangat membantu wisatawan, petunjuk arah yang dimaksud adalah petunjuk arah ke masjid/ musholah, toilet, penginapan, dan rumah makan. Sebagian besar objek wisata di kawasan pengembangan wisata halal ini telah memiliki petunjuk arah namun jika tidak ditemukan wisatawan dapat bertanya secara langsung kepada penjaga di masing-masing objek wisata.

3. Terhindar dari pornoaksi dan kemusrikan

Kebanyakan Objek wisata di Kecamatan Bontotiro merupakan tempat yang dianggap suci dan sakral oleh warga sekitar, sehingga warga juga sangat menjaga kawasan agar terhindar dari kegiatan yang menjerumus ke arah pornoaksi. Namun walau pun dianggap sakral, pemerintah dan warga setempat melarang keras tindakan kemusrikan yang terjadi terlebih kepada masyarakat yang berkunjung ke makam dato tiro, diantisipasi dengan adanya pos penjagaan sebelum memasuki ruangan makam dato tiro.

4. Berpakaian dan berpenampilan sopan bagi pramuwisata dan tenaga pelayanan

Mayoritas penduduk Kecamatan Bontotiro adalah beragama islam dengan memegang norma-norma dalam keyakinan dan tradisi Pramuwisata atau tenaga pelayan adapun yang dimaksud di lokasi penelitian adalah penjaga objek wisata ataupun masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pariwisata berpenampilan sopan dengan menggunakan pakaian yang layak, tertutup dan berpenampilan tidak berlebihan.

Strategi Pengembangan Wisata Halal di Kecamatan Bontotiro

Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah yang didalamnya banyak terdapat insan-insan yang diberi kemampuan lebih oleh Allah SWT dalam hal keilmuan, moral dan spiritual, tentunya diharapkan dapat memberikan masukan dan saran melalui karya tulis ilmiah terkait pengembangan kawasan halal tourism di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

Berkaitan dengan pengembangan wisata halal di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, untuk mengembangkan kawasan halal tourism di Kec. Bontotiro diperlukan pengembangan beberapa

aspek yaitu promosi yang diprioritaskan pada media digital, fasilitas pariwisata yang diprioritaskan pada fasilitas tempat ibadah dan kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, Perguruan tinggi sesuai dengan perannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa melalui tri dharma perguruan tinggi, melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan aktif berkontribusi kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia, seperti kegiatan pelatihan wirausaha, membekali calon wirausaha agar memiliki kemampuan wirausaha yang sesuai dengan konsep wisata halal yang direncanakan. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat mendukung aspek promosi wisata halal dengan melakukan seminar atau pelatihan media digital kepada masyarakat lokal agar dapat mengetahui teknik promosi media digital untuk mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara ke lokasi objek wisata.

Sosialisasi Pengembangan UMKM Berbasis Syariah di Kawasan Wisata Halal Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

UMKM merupakan kelompok usaha terbesar di Indonesia dan memiliki ketahanan terhadap krisis ekonomi, itulah mengapa UMKM masih terus eksis dan bertahan sampai sekarang. Pengembangan UMKM mampu memperluas Basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan structural, yaitu dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional sehingga pengembangan UMKM merupakan prioritas dan menjadi sangat vital. (Nova Yanti Maleha, 2015).

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) , memiliki total aset tidak lebih dari Rp.600 juta (Di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa survive di tengah 81 perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. (Eris Dwi Retno, 2016). Melihat dari output pengabdian masyarakat yang ingin kami kembangkan yaitu Wisata Halal di kecamatan Bontotiro maka karakteristik UMKM yang paling tepat untuk kami kembangkan adalah UMKM berbasis Syariah. Pada dasarnya UMKM Berbasis Syariah mempunyai fungsi yang sama dengan UMKM pada umumnya hanya saja perbedaannya terletak pada tata Kelola dan sistem yang digunakan tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Untuk bisa melakukan pengembangan UMKM ini maka yang paling penting untuk dilakukan adalah pemahaman masyarakat mengenai produk apa saja yang memiliki potensi yang besar memberikan keuntungan terhadap pelaku UMKM tentunya dengan mempertimbangkan juga sektor wilayah dan pariwisata yang dimiliki wilayah tersebut. Kecamatan Bontotiro merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata pantai yang sangat bagus, dimana masyarakat yang ingin mengembangkan UMKM di wilayah pariwisata ini, masyarakat bisa lebih kreatif dalam membuat inovasi produk dan pelayanan atau Hospitality.

Wisata pantai di kecamatan Bontotiro ini menjadi salah satu daya Tarik pengunjung yang ingin melakukan rekreasi dan ingin merasakan liburan di sekitar pantai. Hal ini bisa di manfaatkan masyarakat sekitar dengan memberikan jasa kepada pengunjung yang ingin berenang di sekitar pantai dengan memberikan jasa sewa Ban/pelampung. Selain itu dari sektor makanan halal UMKM bisa mengembangkan rumah makan pembakaran ikan di sekitar pantai dan kedai minuman kelapa muda.

Di Kawasan pantai di kecamatan bontotiro masyarakat sudah banyak menyediakan jasa akomodasi untuk pengunjung, dimana jika akomodasi ini di tata dan di desain se-menarik mungkin bisa menjadi salah satu daya Tarik tersendiri untuk wisatawan yang berkunjung di daerah sekitar pantai. Sejauh ini masyarakat di kecamatan bontotiro sudah banyak mengembangkan jenis usaha kreatif salah satunya di bidang kerajinan tangan dan makanan ringan kemasan khas daerah bontotiro. Satu hal yang menarik dari usaha kreatif yang dimiliki

oleh masyarakat bontotiro adalah kerajinan atap konjo dimana kerajinan ini adalah kerajinan dari kayu rotan yang kemudian dikelola menjadi alat perkakas rumah tangga seperti keranjang hingga menjadi barang fashion seperti tas dan topi. Kerajinan atap konjo ini bisa menjadi potensi daya Tarik wisatawan yang berkunjung di sekitar Kawasan wisata bontotiro dan tentunya perlu ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat agar bisa mengembangkan dan membantu masyarakat sekitar untuk bisa mengembangkan UMKMinya. Pengembangan UMKM berbasis halal ini tentunya perlu dukungan permodalan agar masyarakat mampu mengembangkan usaha mereka. UMKM dapat di kolaborasi dengan LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Permodalan menjadi salah satu kendala yang dimiliki oleh masyarakat karena susahny mendapatkan akses modal dalam bentuk pinjaman di

perbankan. Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya berorientasi pada pencarian profit saja tetapi juga memiliki sisi social salah satunya pemberdayaan kepada para pengusaha UMKM.

(Singgih Muheramtohad, 2017). Oleh karena itu salah satu bentuk keberlanjutan dari pengabdian ini adalah diadakannya kerjasama dengan lembaga keuangan syariah dalam membantu pelaku UMKM di kecamatan Bontotiro untuk mendapatkan modal.

Selain dari permodalan dalam bentuk pinjaman dari LKS maupun perbankan syariah. Upaya yang bisa dilakukan masyarakat dalam membantu UMKM untuk mendapatkan modal adalah dengan didirikannya Baitul Mal wattamwil (BMT). BMT dalam operasionalnya pada dasarnya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan masyarakat. (Eris Dwi Retno, 2016). Menurut (Renny Oktavia, 2014) BMT lebih mengarah pada usaha-usaha berbasis syariah dengan pengumpulan dan penyaluran dana non-profit seperti: zakat, infaq, sedekah, dan waqaf. Sedangkan BMT mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

BMT sebagai Lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah menjadi suatu opsi yang bisa membantu pelaku UMKM di sekitar Kawasan wisata untuk mendapatkan permodalan sehingga masyarakat bisa mengembangkan usahanya. Secara umum BMT dalam melaksanakan fungsi-fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (Funding)
2. Produk penyaluran dana (Lending)
3. Produk Jasa
4. ZISWAH (Zakat, Infaq, sedekah, waqaf dan hibah)

Dengan demikian sebagaimana fungsi dari BMT yaitu menjalankan dua misi seperti Namanya Baitul Mal wattamwil yaitu menjalankan misi social dan misi untuk mendapatkan keuntungan. Sekiranya ini mampu membantu masyarakat sekitar untuk menjalankan usahanya khususnya pada kendala permodalan.

Rencana Keberlanjutan

Hal yang penting dalam keberlanjutan program adalah materi sosialisasi yang disampaikan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat desa oleh kedepannya dapat diimplementasikan. Untuk itu diperlukan peran nyata dari kepala desa dan aparatnya menyusun program pembentukan Koperasi/BMT syariah yang dapat memenuhi kebutuhan pendanaan UMKM masyarakat desa secara bertahap. Selain itu Dosen Pelaksana Pengabdian akan senantiasa memantau tindak lanjut pengembangan UMKM berbasis syariah di daerah tersebut.

Masyarakat sekitar juga lebih paham dengan bagaimana cara mengembangkan usaha mereka dengan melakukan inovasi terbaru dalam pengembangan usahanya, mengetahui usaha apa saja yang memiliki potensi untuk dikembangkan di sekitar wilayah mereka. Memperdalam literasi masyarakat dalam hal keuangan syariah khususnya pada Lembaga keuangan syariah dan permodalan dalam usaha syariah. Dan yang paling penting adalah implementasi masyarakat atas sosialisasi ini bisa terus berjalan dan terpantau secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Pengembangan halal tourism di Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba menunjukkan potensi yang signifikan ditinjau dari aspek daya tarik wisata alam, religi, dan budaya yang saling terintegrasi serta didukung oleh citra religius dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pengukuran terhadap 11 indikator pedoman wisata halal, Bontotiro telah memenuhi sebagian besar kriteria dasar, terutama pada aspek daya tarik, citra positif, norma sosial, dan dukungan masyarakat.

Namun demikian, penguatan masih diperlukan pada aspek kebijakan formal, peningkatan fasilitas ibadah dan sarana pendukung, sertifikasi halal produk dan jasa, promosi berbasis digital, serta akses permodalan bagi pelaku UMKM. Strategi pengembangan yang direkomendasikan meliputi optimalisasi peran perguruan tinggi melalui pengabdian masyarakat, pelatihan kewirausahaan dan literasi keuangan syariah, penguatan UMKM berbasis syariah, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah dan pembentukan BMT sebagai solusi pembiayaan.

Dengan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah, Kecamatan Bontotiro berpotensi berkembang menjadi destinasi wisata halal yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pemberdayaan ekonomi lokal secara nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan Pengabdian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- A, A., & Musaddad. (2023). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 11(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2023.v11.i01.p01>
- Battour, Mohamed, & Sharif, N. M. (2019). Understanding Halal Tourism: Definitions and Perceptions. *Tourism Recreation Research*, 4(3). <https://doi.org/https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2018.1561450> .
- Pemerintah Kabupaten Bulukumba. (2021). No Title Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021–2025.
- Saptorini, M. M. I. D., Militina, T., & Jiuhardi, J. (2018). Pengaruh belanja pembangunan sektor pariwisata dan investasi serta promosi sektor pariwisata terhadap peningkatan kunjungan wisatawan dan pendapatan asli daerah di kabupaten berau. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.29264/jiem.v3i3.3652>
- Setiawati, I. D., Widyastutik, W., & Firdaus, M. (2023). Role and Determinants of Domestic Tourism Demand in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 12(3), 293–304. <https://doi.org/10.15294/edaj.v12i3.68495>
- Zainiddinov, Akmal, & Weiermai, K. (2018). Halal Tourism Development in Indonesia: Opportunities and Challenges. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 3(2), 139–152. <https://doi.org/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567118300521> .
- Pembangunan Pariwisata Umbul Sidomukti Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang. *Edaj*, 4(4), 443 - 451. [Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Edaj](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Edaj) Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021).
- Analisis Halal Tourism Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 302. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V7i1.1574>
- Perda Kabupaten Bulukumba. (2015). Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No 9. 18.
- Pitaloka, L. (2019). Dampak Wisatawan Asing Terhadap Etika Remaja Islam Di Desa Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten.
- Rendayani, M. (2018). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Wisata Syariah Puncak Mas Sukadanaham Bandar Lampung. 1 - 10. <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/12672>
- Rizky, D. L. (2021).
- Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Kampung Batik Laweyan Surakarta. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89405> Surur, Fadhil. (2013).
- Halal Tourism: Antecedent Of Tourist's Satisfaction And Word Of Mouth (WOM). *Asia Pacific Journal Of Tourism Research*, 23(5), 463 - 472. <https://doi.org/10.1080/10941665.2018.1466816>
- Zulhadi, T., Saleh, M. S., & Anggraini, R. (2017).
- Analisis Laik Fungsi Jalan Nasional Batas Kota Sigli – Beureunuen Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process. *Jurnal Teknik Sipil Universitas Syiah Kuala*, 1(1), 251 - 262. <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JTS/Article/View/9900>